

## CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan pengukuran capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, baik capaian kinerja sasaran/program strategis yang hendak diwujudkan tahun 2019.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Capaian per Sasaran (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien		Capaian laporan kinerja Pemerintah Provinsi Banten	100	99,95	99,95

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Capaian per Sasaran (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien		Capaian laporan kinerja Pemerintah Provinsi Banten	100	99,24	99,24

Capaian kinerja pada program dan kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 dengan gambaran sebagai berikut :

### Capaian Kinerja Bagian Perundang-undangan Tahun 2019

No.	Program	Indikator Kinerja Satuan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	Persentase realisasi target prolegda	100	100	100
		Pesentase raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik	80	100	100

### Capaian Kinerja Bagian Perundang-undangan Tahun 2018

No.	Program	Indikator Kinerja Satuan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	Persentase realisasi target prolegda	100	96,87	96,87
		Persentase raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik	80	100	100

### Capaian Kinerja Bagian Bantuan Hukum dan HAM Tahun 2019

No.	Program	Indikator Kinerja Satuan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	Persentase keselarasan peraturan perundang-undangan daerah dengan regulasi hukum nasional.	80	100	100

### Capaian Kinerja Bagian Bantuan Hukum dan HAM Tahun 2018

No.	Program	Indikator Kinerja Satuan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	Persentase keselarasan peraturan perundang-undangan daerah dengan regulasi hukum nasional.	80	98,08	98,08

### Capaian Kinerja Bagian Evaluasi, Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum Tahun 2019

No.	Program	Indikator Kinerja Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (skala)	3.0	3.0	100

### Capaian Kinerja Bagian Evaluasi, Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum Tahun 2018

No.	Program	Indikator Kinerja Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (skala)	3.0	3,0	100

### Capaian Kegiatan Raperda Tahun 2019

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Program pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	1.0	1.0	100
2		Penyusunan RAPERDA Usul Gubernur	%	100	100	100
3		Asistensi Penyusunan Raperda	dokumen	6.0	6.0	100

### Capaian Kegiatan Raperda Tahun 2018

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Program pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	3	1	33,33
2		Penyusunan RAPERDA Usul Gubernur	Raperda	4	4	100
3		Asistensi Penyusunan Raperda	dokumen	6	5	83,33

### Capaian Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Tahun 2019

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Evaluasi Raperda Kab/Kota	%	100	100	100
2		Fasilitasi Raperda Kab/Kota	%	100	100	100

### Capaian Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Tahun 2018

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Evaluasi Raperda Kab/Kota	%	100	100	100

### Capaian Kegiatan Penyusunan Keputusan dan Peraturan Tahun 2019

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten	Legal Drafter Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Non APBD usul SKPD Unit Kerja	%	100	100	100
2		Penyusunan Legal Drafter Keputusan Gubernur	%	100	100	100

### Capaian Kegiatan Penyusunan Keputusan dan Peraturan Tahun 2018

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten	Legal Drafter Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Non APBD usul SKPD Unit Kerja	%	100	100	100
2		Penyusunan Legal Drafter Keputusan Gubernur	%	100	100	100

### Capaian Kegiatan Sosialisasi Hukum Tahun 2019

No.	Kegiatan Capaian per Sasaran (%)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Sosialisasi Hukum	Pembinaan Pelajar Sadar Hukum	%	100	100	100

### Capaian Kegiatan Sosialisasi Hukum Tahun 2018

No.	Kegiatan Capaian per Sasaran (%)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Sosialisasi Hukum	Pembinaan Pelajar Sadar Hukum	%	100	100	100

### Capaian Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2019

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pembinaan Pengelolaan JDI Hukum Provinsi Banten	%	100	100	100
2		Rakor Bidang Hukum Kab/Kota se-Provinsi Banten	%	100	100	100
3		Pengadaan Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia ( HPPRI) dan Buku Literatur Hukum	%	100	100	100
4		Penggandan Produk Hukum Daerah Provinsi Banten	%	100	100	100
5		Penggandaan JDIH Online Wibsite Provinsi Banten	%	100	100	100
6		Monitoring dan	%	100	100	100

		Evaluasi Pelaksanaan JDIH di Kabupaten/Kota				
--	--	---	--	--	--	--

**Capaian Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2018**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pembinaan Pengelolaan JDI Hukum Provinsi Banten	%	100	100	100
2		Rakor Bidang Hukum Kab/Kota se-Provinsi Banten	%	100	100	100
3		Pengadaan Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia ( HPPRI) dan Buku Literatur Hukum	%	100	100	100
4		Penggandan Produk Hukum Daerah Provinsi Banten	%	100	100	100
5		Penggandaan JDIH Online Wibase Provinsi Banten	%	100	100	100
6		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH di Kabupaten/Kota	%	100	100	100

**Capaian Kegiatan Tata Usaha Biro Hukum Tahun 2019**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tata Usaha Biro Hukum	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Laporan	6	6	100
2		Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	8	8	100
3		Penyediaan Barang Jasa dan Perkantoran	%	100	100	100
4		Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	100	100	100
5		Rapat Koordinasi ke Dalam dan	bulan	12	12	100

		Keluar Daerah				
6		Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	%	100	100	100

**Capaian Kegiatan Tata Usaha Biro Hukum Tahun 2018**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tata Usaha Biro Hukum	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Laporan	6	6	100
2		Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	8	8	100
3		Penyediaan Barang Jasa dan Perkantoran	%	100	100	100
4		Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	100	100	100
5		Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah	bulan	12	12	100
6		Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	%	100	100	100

**Capaian Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum Tahun 2019**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penanganan Sengketa Hukum	Penanganan Perkara/sengketa hukum di Pradilan (Litigasi)	%	100	100	100
2		Penyusunan Legal Momerandum	Dokumen	1	8	100
3		Forum Diskusi Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Non Litigasi)	%	100	100	100

### Capaian Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum Tahun 2018

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penanganan Sengketa Hukum	Penanganan Perkara/sengketa hukum di Pradilan (Litigasi)	%	100	100	100
2		Penyusunan Legal Momerandum	Dokumen	1	6	100
3		Forum Diskusi Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Non Litigasi)	%	100	94,25	94,25

### Capaian Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM Tahun 2019

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM	Pembinaan HAM bagi masyarakat ,mahasiswa, dan pelajar Kab/Kota se- Provinsi Banten	Laporan Kegiatan	3	3	100
2		Harmonisasi RAPERDA yang berspektif HAM	Raperda	2	2	100
3		Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Banten	Laporan	4	4	100

### Capaian Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM Tahun 2018

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM	Pembinaan HAM bagi masyarakat ,mahasiswa, dan pelajar Kab/Kota se- Provinsi Banten	Laporan Kegiatan	3	3	100
2		Harmonisasi RAPERDA yang berspektif HAM	Raperda	3	3	100
3		Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Banten	Laporan	3	3	100

### Capaian Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum Tahun 2019

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Bantuan Hukum	Penyusunan Perjanjian Hukum /Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Hukum /Kementerian/LPN K / Pemerintah Daerah	%	100	100	100
		Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	%	100	100	100

### Capaian Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum Tahun 2018

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Bantuan Hukum	Penyusunan Perjanjian Hukum /Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Hukum /Kementerian/LPN K / Pemerintah Daerah	%	100	100	100
		Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	%	100	100	100

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019  
sbb:

NO	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET BELANJA	REALISASI BELANJA		SISA ANGGARAN (Rp)	(%)
			KEUANGAN (Rp)	(%)		
I.	Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah					
1.	Tata Usaha Biro Hukum	576.734.500	499.591.635	86,62	77.142.865	13,38
II.	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum					
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	219.754.500	69.056.200	31,42	150.698.300	68,58



3	Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten	121.362.500	109.132.500	89,92	12.230.000	10,08
4	Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	109.477.000	97.396.000	88,96	12.081.000	11,04
5	Penanganan Sengketa Hukum	550.720.000	253.505.600	46,03	297.214.400	53,97
6,	Peningkatan Perlindungan Hukum & HAM	383.502.000	359.094.000	93,64	24.408.000	6,36
7.	Pelayanan Bantuan Hukum	465.948.500	401.578.600	86,19	64.369.900	13,81
8.	Sosialisasi Hukum	349.522.000	266.804.350	76,33	82.717.650	23,67
9.	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	288.564.000	261.256.600	90,54	27.307.400	9,46
	<b>J U M L A H</b>	<b>3.065.585.000</b>	<b>2.317.415.485</b>	<b>75,59</b>	<b>748.169.515</b>	<b>24,41</b>

### C.REALISASI FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA			REALISASI		
			TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA	%	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>							
<b>1.</b>	<b>Tata Usaha Biro Hukum</b>	Capaian Program	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019		Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019	<b>100</b>
		Masukan	- Dana - SDM - Waktu	Rp. 576.734.500 7 Orang 12 Bulan	<b>100</b>	- Dana - SDM - Waktu	Rp. 499.591.635 7 Orang 12 Bulan	<b>86,62</b>
		Keluaran	- Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan - Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset - Penyediaan Barang Jasa Perkantoran - Peningkatan Kapasitas Aparatur - Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan - Rapat Koordinasi ke dalam dan keluar daerah	8 dok  6 lap  100% 100 % 100%  12 bulan	<b>100</b>	- Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan - Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset - Penyediaan Barang Jasa Perkantoran - Peningkatan Kapasitas Aparatur - Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan - Rapat Koordinasi ke dalam dan keluar daerah	8 dok  6 lap  100% 100% 100%  - 12 bulan	<b>100</b>
		Hasil	Nilai IKM	3 skala pada Tahun 2019	100	Nilai IKM	3 skala pada Tahun 2019	100
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum</b>							
<b>2.</b>	<b>Sosialisasi Hukum</b>	Capaian Program	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019		Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019	

		Masukan	- Dana - SDM - Waktu	Rp.349.522.000 3 orang 12 bulan	<b>100</b>	- Dana - SDM - Waktu	Rp. 266.804.350 3 orang 12 Bulan	<b>76,33</b>
		Keluaran	Peningkatan Pemahaman Kesadaran Hukum	12 lap	<b>100</b>	Peningkatan Pemahaman Kesadaran Hukum	12 lap	<b>100</b>
		Hasil	Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	75% pada Tahun 2019		Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	75% pada Tahun 2019	
3.	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Capaian Program	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019		Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019	
		Masukan	- Dana - SDM - Waktu	Rp. 288.564.000 3 orang 12 Bulan	<b>100</b>	- Dana - SDM - Waktu	Rp.261.256.000 3 orang 12 Bulan	<b>90,54</b>
		Keluaran	- Pembinaan Pengelolaan JDIH Provinsi Banten - Rapat Koordinasi Bidang Hukum Provinsi dan Kab/Kota - Pengadaan Himpunan Peraturan, perundang-undangan RI - Penggandaan Produk Hukum Daerah Provinsi Banten - Pengelolaan Web JDIH Provinsi Banten - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH di Kab/Kota	70 org  70 org  2 pkt HPPRI/1 pkt literatur  1 Paket  12 dok 2 Dok	<b>100</b>	- Pengelolaan JDIH Provinsi Banten - Rapat Koordinasi Bidang Hukum Provinsi dan Kab/Kota - Pengadaan Himpunan Peraturan, perundang-undangan RI - Penggandaan Produk Hukum Daerah Provinsi Banten - Pengelolaan Web JDIH Provinsi Banten - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH di Kab/Kota	70 org  70 org  2 pkt HPPRI/1 pkt literatur  1 PAket  12 dok 2 Dok	<b>100</b>
		Hasil	Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	80% pada Tahun 2019		Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	80% pada Tahun 2019	
4.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Capaian Program	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2018		Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2018	
		Masukan	- Dana - SDM - Waktu	Rp. 219.754.500 11 orang 12 Bulan	<b>100</b>	- Dana - SDM - Waktu	Rp. 69.056.200 11 orang 12 bulan	<b>31,42</b>
		Keluaran	1. Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. Penyusunan Raperda Usul Gubernur 3. Asistensi Penyusunan RAPERDA	1 dok  100 %  6 dok	<b>100</b>	1. Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. Penyusunan Raperda Usul Gubernur 3. Asistensi Penyusunan RAPERDA	1 dok  100%  6 dok	<b>100</b>

		Hasil	1. Prosentase Realisasi Target Prolegda 2. Prosentase Raperda Inisiatif yang memiliki Naskah Akademik	100% 80%		1. Prosentase Realisasi Target Prolegda 2. Prosentase Raperda Inisiatif yang memiliki Naskah Akademik	100% 80%	
5.	<b>Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Bantwn</b>	Capaian Program	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019		Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019	
		Masukan	- Dana - SDM - Waktu	Rp 121.362.500 8 orang 12 Bulan	<b>100</b>	- Dana - SDM - Waktu	Rp. 109.132.500 8 orang 12 Bulan	<b>89,92</b>
		Keluaran	1. Legal Drafter Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur non APBD Usul SKPD/Unit Kerja 2. Penyusunan Legal Drafter Keputusan Gubernur	100%  100%	<b>100</b>	1. Legal Drafter Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur non APBD Usul SKPD/Unit Kerja 2. Penyusunan Legal Drafter Keputusan Gubernur	100%  100%	<b>100</b>
		Hasil	Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	80% pada Tahun 2019		Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	80% pada Tahun 2019	
6.	<b>Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota</b>	Capaian Program	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019		Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019	
		Masukan	- Dana - SDM - Waktu	Rp.109.477.000 4 orang 12 Bulan	<b>100</b>	- Dana - SDM - Waktu	Rp97.396.000 4 orang 12 Bulan	<b>88,96</b>
		Hasil	Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	80% pada Tahun 2019	<b>100</b>	Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	80% pada Tahun 2019	<b>100</b>
7.	<b>Penanganan Sengketa Hukum</b>	Capaian Program	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019		Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019	
		Masukan	- Dana - SDM - Waktu	Rp.550.720.000 3 orang 12 Bulan	<b>100</b>	- Dana - SDM - Waktu	Rp.253.505.600 3 orang 12 Bulan	<b>46,03</b>
		Keluaran	1. Penangan Perkara/Sengketa Hukum di Pradilan (Litigasi) 2. Penyusunan legal Memorandum 3. Forum diskusi permasalahan hukum di lingkungan pemerintah provinsi Banten (non litigasi)	100 %  1 DOK  100%	<b>100</b>	1. Penangan Perkara/Sengketa Hukum di Pradilan (Litigasi) 2. Penyusunan legal Memorandum 3. Forum diskusi permasalahan hukum di lingkungan pemerintah provinsi Banten (non litigasi)	100%  1 Dok  100%	
		Hasil	Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	80% pada Tahun 2019		Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	80% pada Tahun 2019	

<b>8.</b>	<b>Pelayanan Bantuan Hukum</b>	Capaian Program	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019		Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019	
		Masukan	- Dana - SDM - Waktu	Rp. 465.948.500 3 orang 12 bulan	<b>100</b>	- Dana - SDM - Waktu	Rp.401.578.600 3 orang 12 bulan	<b>86,19</b>
		Keluaran	1. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Hukum/Kementerian/LPNK/Pemerintah daerah  2. Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	100%  100%	<b>100</b>	1. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Hukum/Kementerian /LPNK/Pemerintah daerah  2. Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	100%  100%	
		Hasil	Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	80% pada Tahun 2019		Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	80% pada Tahun 2019	
<b>9.</b>	<b>Peningkatan Perlindungan Hukum &amp; HAM</b>	Capaian Program	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019		Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75 nilai pada Tahun 2019	
		Masukan	- Dana - SDM - Waktu	Rp. 383.502.000 3 orang 12 bulan	<b>100</b>	- Dana - SDM - Waktu	Rp. 359.094.000 3 orang 12 bulan	<b>100</b>
		Keluaran	1. Pembinaan HAM bagi masyarakat, mahasiswa dan pelajar Kab/Kota se Provinsi Banten  2. Harmonisasi Raperda yang berprespektif HAM  3. RAPAT KOORDINASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI BANTEN	3 lap  2 raperda  4 Laporan		1. Pembinaan HAM bagi masyarakat, mahasiswa dan pelajar Kab/Kota se Provinsi Banten  2. Harmonisasi Raperda yang berprespektif HAM  3. RAPAT KOORDINASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI BANTEN	3 lap  2 raperda  4 Laporan	93,64
		Hasil	Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	80% pada Tahun 2019		Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	80% pada Tahun 2019	

Berikut adalah penjelasan realisasi keuangan dan fisik pada program dan kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Hukum :

Realisasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2019 hanya sebesar Rp. 2.317.415.485 (75,59%), hal ini terjadi karena pada beberapa kegiatan terdapat efisiensi anggaran dan beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak tercapai.

Dari 9 (sembilan) kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, terdapat 3 kegiatan yang realisasinya dibawah 80% yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, rencana biaya pada APBD murni sebesar Rp.249.562.500,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) berkurang pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.219.754.500,00 (*Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.69.056.200,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 31,42%;

**Penjelasan :**

- a. Tolak ukur kegiatan Penyusunan Program Pembentukan Perda/Prolegda Provinsi telah selesai dilaksanakan 100%
- b. Tolak Ukur Penyusunan Raperda Usul Gubernur target 6 Raperda telah selsai dibahas
- c. Tolak Ukur Asistensi Penyusunan Raperda, sudah tersusun 6 dokumen pidato Gubernur.
- d. Disetiap tolak ukur terdapat efisiensi pembiayaan.

Efisiensi keuangan dalam setiap sub kegiatan yang berasal dari Belanja Penggandaan, Belanja Narasumber dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

- **Efisiensi pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**, disebabkan Tahun 2019 merupakan tahun pemilihan Presiden, DPD, DPR dan DPRD Provinsi/Kab/Kota yang membawa dampak terhadap agenda pembahasan berupa konsultasi, koordinasi, dan tidak meminta pendampingan Biro Hukum, namun pada saat pembahasan di gedung DPRD, baik untuk Finalisasi Raperda, pembahasan pra-fasilitasi, Biro Hukum diminta hadir, kehadiran pada pembahasan

tersebut terkadang berbarengan dengan jadwal Pansus lainnya, yang juga minta pendampingan sehingga tidak bisa diikuti seluruhnya.

- **Efisiensi Belanja Pengandaan**, karena sedikitnya jadwal paripurna di DPRD Provinsi Banten yang dalam 1 tahun hanya 5 kali dan untuk pengantar Raperda juga hanya 1 Raperda yaitu Penyertaan Modal ke dalam PT.Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda), Raperda lainnya masih di lakukan pembahasan substantif oleh pemrakarsa (Perangkat Daerah yang mengusulkan) seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, efisiensi keuangan juga untuk 2 Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (Banten Lama dan KP3B), Raperda tentang Perubahan RPJMD, pengandaannya berasal dari anggaran Bappeda Provinsi Banten.

- **Efisiensi Belanja Narasumber**, untuk tolok ukur kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dianggarkan 2 orang narasumber, pelaksanaannya cukup hanya menghadirkan 1 narasumber dari Kanwil Hukum dan HAM. Secara keseluruhan, tanpa mengurangi tahapan dalam penyusunan Raperda untuk kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah.

2. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum, rencana biaya pada APBD murni sebesar Rp.639.562.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua RibuRupiah*) berkurang pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.550.720.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.253.505.600,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 46,03%;

⇒ Realisasi fisik kegiatan tercapai 99,71%

⇒ Realisasi keuangan sebesar 46,03%, karena ada efisiensi keuangan pada tolok ukur kegiatan sebagai berikut :

a. Tolok ukur Penanganan Perkara/Sengketa Hukum di Pengadilan (Litigasi), efisiensi Keuangan, dari target perencanaan 10 Perkara, yang masuk dan diproses oleh Biro Hukum sudah selesai 16 Perkara;

Pagu tolok ukur : Rp.514.899.00,-

Realisasi keuangan : Rp.222.784.600,-

Sisa Anggaran : Rp.292.114.400,-

Permasalahan :

- Banyak Anggaran yg tdk terealisasi ketika proses persidangan, dikarenakan penggugat mencabut gugatannya.
- Ada efisiensi keuangan pada belanja perangkat, materi dan benda pos, belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja jasa tenaga ahli

Solusi / Penjelasan :

Anggaran Penanganan Sengketa Hukum yang bersifat Penyediaan Anggaran

- b. Tolok ukur Penyusunan Legal Memorandum, belum bisa dilaksanakan karena sebagai fasilitasi saja, sampai akhir 31 Desember 2019 belum ada permintaan masuk ke Biro Hukum untuk memberikan Pendapat Hukum;

Pagu tolok ukur : Rp.1.600.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.0,-

Sisa Anggaran : Rp.1.600.000,-

Permasalahan :

Tidak adanya permohonan dari OPD ke Biro Hukum

Penjelasan :

Anggaran Penanganan Sengketa Hukum bersifat Penyediaan Anggaran

- c. Tolok ukur Forum Diskusi Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Non Litigasi), Kegiatan Forum Diskusi dilaksanakan atas dasar by order/perintah Gubernur untuk membahas permasalahan hukum (Non Litigasi), sudah terlaksana sesuai perencanaan.

Pagu Anggaran : Rp.34.221.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.30.721.000,-

Sisa Anggaran : Rp.3.500.000,-

Penjelasan : ada efisiensi keuangan pada belanja jasa narasumber/instruktur

3. Kegiatan Sosialisasi Hukum Realisasi Keuangan hanya sebesar (76,33%), Realisasi fisik kegiatan tercapai 100% yaitu telah terlaksana

8 kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelajar di Kab/Kota se-Provinsi Banten

⇒ Realisasi keuangan sebesar 76,33%, karena ada efisiensi pengeluaran belanja :

- ✓ Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.18.913.650,-
- ✓ Efisiensi/sisa pagu Uang Saku Peserta Kegiatan yang nilainya disesuaikan dengan Standar Satuan Harga (SSH) sebesar Rp.56.000.000,-
- ✓ Efisiensi/sisa pagu Belanja Jasa Narasumber/Instruktur sebesar Rp7.500.000,-
- ✓ Efisiensi Belanja Dokumentasi sebesar Rp.304.000,-